

## **ABSTRAK**

### **Analisis Pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Mukomuko**

**Oleh : Grache Viola**

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat desa melalui pemberdayaan koperasi. Di Kabupaten Mukomuko, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat serta keterbatasan sumber daya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Mukomuko menggunakan teori program Hans Hochholzer dalam E. Hetzer (2012) yang meliputi indikator input, proses dan output. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input, pelaksanaan program telah didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pendampingan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Mukomuko, serta tersedianya dasar hukum pembentukan koperasi. Pada aspek proses, pemerintah telah melaksanakan sosialisasi, musyawarah desa, pembentukan kepengurusan, dan legalisasi koperasi. Pada aspek output, koperasi telah terbentuk secara legal dan mulai menjalankan unit usaha, namun jumlah anggota aktif masih rendah karena kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan, serta penguatan kapasitas pengurus agar pelaksanaan program berjalan lebih optimal.

**Kata kunci:** Pelaksanaan Program, Koperasi Desa Merah Putih, program, kabupaten mukomuko, Hochholzer, Masyarakat

## **ABSTRACT**

### **AN ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE MERAH PUTIH COOPERATIVE PROGRAM IN MUKOMUKO REGENCY**

**By:**  
**Grache Viola**  
**2263201042**

The *Merah Putih* Village Cooperative Program is a government policy aimed at strengthening the rural economy through cooperative empowerment. In Mukomuko Regency, the program's implementation faces various challenges, such as low community participation and trust, as well as limited resources.

This study aims to analyze the implementation of the *Merah Putih* Village Cooperative Program in Mukomuko Regency using Hans Hochholzer's program theory (as cited in E. Hetzer, 2012), which encompasses input, process, and output indicators. A descriptive qualitative approach was employed, and data collection techniques were done through interviews, observation, and documentation.

The results indicate that regarding the input aspect, the program is supported by Presidential Instruction Number 9 of 2025, guidance from the Mukomuko Regency Office of Industry, Trade, Cooperatives, and SMEs, and an established legal basis for cooperative formation. Regarding the process aspect, the government has conducted outreach, village deliberations, the formation of management boards, and cooperative legalization. Regarding the output aspect, cooperatives have been legally established and have begun operating business units; however, the number of active members remains low due to a lack of community understanding and trust in the cooperatives. Therefore, increased outreach, guidance, and capacity building for management boards are necessary to optimize the program's implementation.

**Keywords:** Program Implementation, Village Merah Putih Cooperative, Program, Mukomuko Regency

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi nasional Indonesia menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi berperan sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, serta menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, koperasi juga berkontribusi dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan anggota melalui Sisa Hasil Usaha (SHU). (Melia Mufiani 2025)

Koperasi merupakan salah satu instrumen ekonomi kerakyatan yang berlandaskan asas gotong-royong dan kekeluargaan. Sebagai wadah kolektif, koperasi hadir untuk memperkuat posisi masyarakat dalam sistem ekonomi dengan prinsip *dari anggota, oleh anggota, untuk anggota*. Dalam sejarah pembangunan ekonomi Indonesia, koperasi telah menjadi alternatif yang berpihak pada solidaritas, bukan sekadar akumulasi modal.

Program ini digagas sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi desa dan kelurahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menargetkan pembentukan lebih dari 80.000 koperasi. Dengan bertujuan memperkuat ketahanan pangan, memberantas rentenir, dan mendorong kemandirian ekonomi lokal dengan modal awal dari APBN/APBD/ABDes.

Koperasi bukan konsep baru dalam lanskap ekonomi Indonesia. Sebagai entitas ekonomi yang menjunjung tinggi gotong royong, banyak kisah sukses

koperasi dalam sejarah perekonomian Indonesia. Esensinya Jelas koperasi Menantang paradigma kepemilikan individu dalam sistem ekonomi konvensional, dari anggota, oleh anggota, untuk Anggota. Koperasi menawarkan alternatif yang berpihak pada solidaritas, bukan sekedar menghimpun modal (Muhammad & Aulia 2025).

Koperasi Merah Putih bermanfaat untuk mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi desa melalui berbagai program seperti peningkatan partisipasi masyarakat, modernisasi manajemen, dan perbaikan rantai pasok. Selain itu, koperasi ini bertujuan menekan harga di Tingkat konsumen dan menaikkan harga ditingkat petani, menekan kemiskinan ekstrem, menekan inflasi, serta berperan sebagai akselerator UMK (Juliantono,2025).

Keberadaan koperasi merah putih sangat penting bagi kemajuan desa karena ia adalah wadah ekonomi kerakyatan yang mampu menyatukan potensi individu menjadi kekuatan kolektif, meminimalkan kesenjangan ekonomi, dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Koperasi ini diyakini dapat menjadi solusi untuk mewujudkan kemandirian desa, mengurangi ketergantungan pada pihak luar, dan pada akhirnya, menciptakan desa yang lebih sejahtera dan berdaya (Saputri & Hardiyan 2025).

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian sebagaimana telah beberapa terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang undang. Instruksi presiden nomor 9 tahun

2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih yang berlandaskan undang-undang tahun 1945 perekonomian disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan dengan prinsip gotong royong, kekeluargaan dan saling membantu. (Sekretariat Kabinet RI, 2025)

Di Indonesia, masalah koperasi merah putih masih menjadi tantangan serius meskipun kurangnya pengawasan dan profesionalisme, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, serta tantangan permodalan dan sumber daya manusia (SDM). Dengan prevalensi koperasi desa merah putih di tingkat nasional tercatat sebesar 96,88%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh desa di Indonesia telah memiliki koperasi merah putih sebagai wadah ekonomi kerakyatan. Maka koperasi telah menjadi salah satu instrumen strategis pembangunan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada kemandirian dan pemerataan.

Di Kabupaten Mukomuko terdapat koperasi desa dengan jumlah 150 KDMP, yang menjadi wadah ekonomi kerakyatan yang berperan penting dalam mendukung kemandirian dan pemerataan pembangunan desa. Koperasi hadir hampir di setiap desa sebagai wadah untuk mengelola potensi lokal, mulai dari pertanian, perkebunan, hingga perikanan. Keberadaan koperasi ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian masyarakat desa, meningkatkan daya tawar ekonomi, serta menjadi motor pemerataan pembangunan. Program Koperasi Desa

Merah Putih berfokus pada penguatan ekonomi desa, meliputi Program Sembako Murah, Pupuk Subsidi , Layanan Simpan Pinjam, Apotik dan Klinik Desa.

Kabupaten Mukomuko, yang terletak di Provinsi Bengkulu, memiliki total 152 desa dari 15 kecamatan, dengan jumlah desa yang bervariasi di tiap kecamatannya. Jumlah desa yang cukup besar ini menunjukkan betapa luasnya cakupan wilayah dan beragamnya karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Setiap kecamatan memiliki jumlah desa yang berbeda, mencerminkan variasi potensi dan tantangan pembangunan di tingkat lokal. Namun, tidak semua desa dijadikan objek penelitian. Di Kabupaten Mukomuko, ada desa yang menjadi objek penelitian Koperasi Desa Merah Putih, yaitu Desa Pulau Payung yang sudah mulai beroperasi, yang juga sudah terbentuk dan berjalan sebagai mesin penggerak ekonomi desa dengan jumlah penduduk 19.354. (Kabupaten mukomuko 2025)

Namun, Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Mukomuko menghadapi sejumlah tantangan nyata dalam pelaksanaannya. Meskipun hampir seluruh desa telah memiliki Koperasi Merah Putih, tidak semua koperasi mampu tumbuh dan berkembang sesuai harapan. Koperasi Merah Putih Kabupaten Mukomuko: salah satu tantangan yang sering muncul adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi. Koperasi tersebut telah memenuhi aspek legalitas, seperti memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP), namun kesulitan tetap terjadi dalam merekrut anggota baru.

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti permasalahan utama bukan terletak pada administrasi, melainkan pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi untuk bergabung disebabkan oleh trauma masa lalu terkait

dengan Koperasi Unit Desa lama, umumnya berkisar pada kegagalan, ketidaktransparanan, dan penyalahgunaan dana, menyebabkan masyarakat enggan bergabung lagi ke koperasi modern karena takut mengalami kerugian serupa, seperti yang dialami Ketua Koperasi Merah Putih Mukomuko yang kesulitan mencari anggota akibat trauma kegagalan koperasi unit desa di wilayah tersebut.

Dengan pendekatan koperasi sebagai entitas kolektif rakyat, program ini memiliki potensi untuk memperbaiki distribusi ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan. Dalam konteks sosial, citra dan pengalaman masa lalu memiliki pengaruh besar terhadap sikap masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi. Oleh karena itu, membangun kembali kepercayaan masyarakat menjadi langkah penting untuk menghidupkan kembali semangat berkoperasi, terutama di daerah pedesaan seperti di Kabupaten Mukomuko.

Meskipun prevalensi koperasi desa Merah Putih di tingkat nasional telah mencapai 96,88% pada tahun 2025, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah yang terbentuk, tetapi juga oleh kualitas partisipasi masyarakat dan keberlanjutan kelembagaan. Berdasarkan hasil penelitian dari total 150 koperasi yang direncanakan, baru sekitar 44 titik pembangunan koperasi yang terealisasi hingga akhir 2025. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun secara administratif koperasi telah terbentuk, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan struktural.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa koperasi merah putih di Mukomuko menghadapi tantangan ganda tantangan struktural berupa keterbatasan sarana fisik dan infrastruktur, serta tantangan sosial berupa rendahnya kepercayaan dan

partisipasi masyarakat. Kedua faktor ini saling berkaitan dan menentukan keberhasilan koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan.

Untuk mengatasi permasalahan, program KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) berupaya memulihkan kepercayaan masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, dan pembenahan manajemen internal. Tujuannya adalah membangun citra positif koperasi, meningkatkan partisipasi, serta memperluas keanggotaan di Kabupaten Mukomuko. Namun, efektivitas program ini masih perlu ditelaah lebih lanjut, khususnya terkait keberhasilannya dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menambah jumlah anggota koperasi.

Dengan pendekatan koperasi sebagai entitas kolektif rakyat, program ini memiliki potensi untuk memperbaiki distribusi ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya terhadap para pelaku ekonomi mikro dan kecil di pedesaan, Agar usaha yang di kelola menjadi lebih efisien dan memiliki daya saing maka di perlukan adanya fasilitas perkreditan yang dekat dengan masyarakat serta dengan persyaratan yang tidak memberatkan masyarakat kecil pedesaan (Roza, 2024)

Koperasi Desa harus mencakup peningkatan infrastruktur digital dan literasi digital anggota koperasi. Pendekatan yang holistik dan integratif diperlukan untuk memastikan koperasi Desa dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi menjadi strategi penting dalam pengembangan koperasi desa (Syarifuddin & haeruddin 2025).

Untuk meningkatkan dampak pelaksanaan yang sudah ada, diperlukan analisis mendalam terhadap pelaksanaan program-program koperasi desa merah putih. Analisis ini penting karena tidak hanya menilai sejauh mana program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga mengungkap faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya. Selain itu, analisis mendalam juga mampu menyingkap persoalan sosial-psikologis seperti rendahnya kepercayaan masyarakat akibat trauma kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu, yang menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi anggota.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu untuk mengatasi permasalahan yang ada peneliti menggunakan landasan konsep teori program dari Hans Hochholzer E. Hetzer (2012), yang menjelaskan program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian ini bermaksud untuk melihat kondisi yang ada dan berbagai faktor yang menunjang pelayanan publik pada penerapan *program* dengan terkait pelaksanaan program Koperasi Merah Putih di tingkat lokal. Kajian tentang koperasi lebih banyak menyoroti aspek normatif, regulasi, atau kebijakan. Maka dari uraian latar belakang di atas maka penulis membuat judul **“Analisis Pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Mukomuko”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah peneliti paparkan maka peneliti menemukan masalah bagaimana pelaksanaan program koperasi desa merah putih di kabupaten mukomuko?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program (KDMP) Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Mukomuko.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan akademis tentang bagaimana pelaksanaan atau implementasi program Koperasi Desa Merah Putih dijalankan di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Mukomuko. Selain itu, penelitian ini diharapkan digunakan sebagai referensi untuk penelitian terkait, dan pemerintah daerah dalam memahami dinamika implementasi koperasi merah putih di lapangan.

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen koperasi dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi Partisipasi anggota koperasi dan efektivitas program koperasi di tingkat desa.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan pada bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Administrasi Publik, mengenai pemahaman tentang pelaksanaan atau pelaksanaan Program koperasi desa merah putih. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pembuatan tugas mata kuliah dan untuk siapapun yang berkepentingan dengan masalah atau diskusi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### **3. Manfaat akademis**

Secara akademis dari penelitian dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik dan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini memperkaya literatur akademik dengan menghubungkan teori implementasi kebijakan dan teori program dengan realitas sosial di tingkat desa, sehingga dapat menjadi referensi penting bagi kajian tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam konteks lokal